

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Wulandari (2018) yang meneliti tentang Pengaruh *Political Connection* pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan, menemukan bahwa *political connection* pada dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sementara *Political Connection* pada dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sari et al., (2021) menemukan bahwa *Political Connection*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Maulana et al., (2021) menemukan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, karakteristik dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, dan hanya interaksi karakteristik dewan komisaris dalam hubungan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan yang dapat menjadi variabel moderasi.

Thoomaszen & Hidayat (2020) yang meneliti tentang Keberagaman Gender Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan menyatakan bahwa gender dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena keberagaman gender sendiri tidak menjadi patokan

perusahaan bisa mencapai kinerja perusahaan yang baik, ada atau tidaknya keberagaman gender dalam dewan perusahaan tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Kinerja yang baik bisa didapatkan dengan kemampuan dari para anggota dewan dalam mengelola perusahaan itu sendiri.

Sementara Lestari & Mutmainah (2020) menemukan bahwa keberadaan wanita dan keberadaan etnis tionghoa pada jajaran dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, persebaran usia pada jajaran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, persebaran usia pada komposisi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, persebaran masa jabatan pada komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, persebaran masa jabatan pada komposisi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## **B. Teori dan Kajian Pustaka**

### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Masalah konflik agensi dalam perusahaan biasanya terjadi karena principal tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Pihak principal mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para agen untuk bekerja atas nama pemilik dan kepentingan pemilik. Akibatnya, konflik agensi (*agency conflict*) yang sulit diselaraskan dengan teori agensi (*agency theory*). *Agency theory* menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (principal)

dengan orang lain (agent) dalam sebuah kontrak, dimana agent diminta untuk mewakili principal dalam membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Prinsipal adalah pemilik saham yang diwakili oleh dewan komisaris, sedangkan agen adalah manajemen pengelola perusahaan yang diwakili oleh dewan direksi. Masalah keagenan yang timbul dari perbedaan tujuan antara agen yang telah bertindak sesuai dengan keinginan pemilik atau tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Kemudian, masalah keagenan yang timbul dari perbedaan sikap antara agen dengan prinsipal terkait risiko sehingga memungkinkan manajer mengambil tindakan yang berbeda dari yang diinginkan oleh *shareholders* karena adanya perbedaan preferensi risiko (Wulandari, 2018). Prinsipal dan agen memiliki kepentingan masing-masing yang menimbulkan konflik keagenan yang menciptakan biaya keagenan (*agency cost*). Sebagian besar konflik keagenan terjadi karena terdapat perbedaan antara keputusan agen dan keputusan yang akan mensejahterakan prinsipal dan akan menimbulkan biaya keagenan yang biasa disebut *residual loss* (Rosita, 2021).

## **2. *Political Connection***

Faccio (2006) menggolongkan suatu perusahaan memiliki *political connections* apabila setidaknya ada satu pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% hak suara atau manajemen puncak (*Board of Directors*)

yang menjadi anggota parlemen, menteri dan top official dan atau memiliki hubungan erat dengan politisi dan partai.

Dalam penelitian tersebut, *political connections* dalam perusahaan didefinisikan apabila dalam perusahaan memiliki satu *board of directors* yang menjadi anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), menteri, dan atau mantan pejabat serta merupakan mantan anggota militer (purnawirawan polisi dan TNI) dimana merupakan variabel yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, keberadaan board of directors yang memiliki kedekatan dengan top official dalam hal ini presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, tidak dimasukkan sebagai indikator political connections karena data yang tidak memadai untuk dilakukan penelitian (Agustinus, 2019).

Keberadaan orang-orang yang terkait dengan politik dalam susunan dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan telah menimbulkan banyak penyimpangan antara lain perlakuan istimewa untuk mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah, perpajakan yang lebih ringan, akses untuk mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah, perlindungan melalui regulasi pemerintah dan berbagai bentuk lainnya. Berbagai insentif pada perusahaan-perusahaan tertentu tersebut telah merugikan masyarakat umum, karena resource yang dikuasai pemerintah hanya dinikmati perusahaan-perusahaan tertentu (Faccio, 2006). Disisi lain perusahaan yang terkoneksi secara politik harus menanggung biaya untuk perlakuan istimewa dengan adanya political connection. Hal ini

dimungkinkan karena pengaruh politisi dalam pengambilan kebijakan perusahaan dapat menimbulkan distorsi insentif, dan misalokasi investasi serta meningkatkan korupsi (Ang et al., 2010).

### **3. Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi & Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005).

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai

pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015).

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan

akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.

Selanjutnya, kepemilikan institusional diartikan sebagai kepemilikan saham oleh sebuah institusi atau lembaga tertentu. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong meningkatnya pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Ardianingsih & Ardiyani, 2010). Kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham yang cukup besar dapat mengawasi manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar (Hastuti & Suhendah, 2015).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat

pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017).

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2015).

#### **4. Keberagaman Gender Dewan Komisaris**

Gender adalah sebuah konsep yang memandang perbedaan antara pria dan wanita dari sudut nonbiologis misalnya dari aspek sosial, budaya, dan perilaku (Kartikarini & Mutmainah, 2013). Dengan perbedaan gender tersebut, diasumsikan bahwa pria dan wanita akan bertindak atau memiliki respons yang berbeda dalam menghadapi masalah yang sama. Pria dan wanita akan menggunakan pertimbangan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka merespon masalah yang dihadapinya. Keberagaman gender ini dipercaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas dan pelaporan keuangan perusahaan. (Ferreira, 2009) mengemukakan bahwa adanya keberagaman gender dalam manajemen puncak akan meningkatkan kualitas pelaporan laba.



Keberagaman gender dalam manajemen puncak menjadi hal yang menarik untuk dipelajari berkaitan dengan *corporate governance* di Indonesia karena masih adanya anggapan bahwa pria yang lebih pantas menduduki jabatan kepemimpinan dalam perusahaan. Akan tetapi, beberapa penelitian melihat bahwa wanita memiliki potensi yang baik untuk menjadi pemimpin. Ditemukan bahwa hubungan antara keberagaman gender dalam manajemen puncak dengan kinerja keuangan menjadi salah satu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh profitabilitas.

#### **5. Kinerja Keuangan**

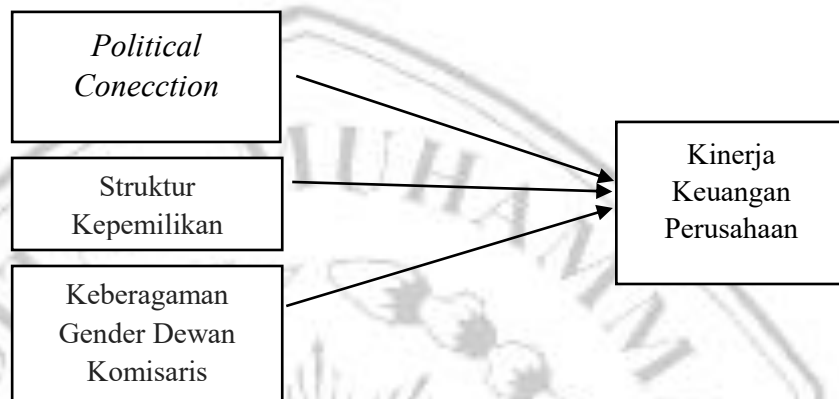
Kinerja Perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu dan merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Wahida et al). Kinerja yang baik dapat meningkatkan profit perusahaan sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai kinerjanya juga akan tinggi. Dengan kinerja usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Sebaliknya apabila terdapat berita buruk mengenai kinerja perusahaan maka akan menyebabkan penurunan harga saham pada perusahaan tersebut (Ardianingsih & Ardiyani, 2010).

Kinerja perusahaan dapat diukur melalui berbagai indikator. Indikator ini umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Profitabilitas merupakan salah satu elemen kunci dari penilaian kinerja perusahaan. Profitabilitas digambarkan sebagai penggunaan aktiva total dan aktiva bersih yang tercatat pada neraca secara efektif (Saraswati & Nur, 2017). Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan banyak cara. Setiap pengukuran memiliki perbedaan. Pengukuran dapat berupa pengukuran absolut (sales, profit), return-based (profit/sales, profit/capital, profit/equity), internal (profit/sales), eksternal (*market value of the firm*) dan lain sebagainya. Pada penulisan kali ini, pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran *Return on Assets* (ROA) (Astuti & Suhenda, 2015).

*Return on Assets* (ROA) merupakan alat untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan (Sari et al., 2021).

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Tinjauan Pustaka dan Penelitian terdahulu dapat diketahui kerangka pemikiran sebagai berikut :



### D. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan tinjauan teori maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini:

#### 1. *Political connection* terhadap kinerja keuangan

Salah satu keunggulan yang didapatkan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik, biasanya lebih mudah dalam mendapatkan proyek pemerintah karena adanya politisi yang ada dalam susunan direksi perusahaan, selain itu kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan hutang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik akan membantu perusahaan yang mengalami tekanan dalam keuangannya untuk bisa bertahan dan bisa terus bersaing dalam industrinya.

Faccio (2006) menemukan bahwa terlepas dari keuntungan yang mereka peroleh, perusahaan yang terhubung secara politis menunjukkan kinerja akuntansi yang lebih buruk daripada perusahaan yang tidak terhubung. Di Perancis, perusahaan yang terhubung secara politis menunjukkan laba yang lebih rendah karena tagihan upah yang lebih tinggi. Namun demikian Sutopo et al., (2017) menjelaskan bahwa koneksi politik akan meningkatkan kinerja bank dan dengan adanya koneksi politik mendapatkan biaya pendanaan yang lebih rendah.

Berdasarkan teori agensi, salah satu tanggung jawab manajemen adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam menjalankan tugas, manajemen menghadapi permasalahan yang kompleks baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. yang menjelaskan mengenai hubungan antara manajemen dengan prinsipal. Seringkali terjadi permasalahan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Namun permasalahan manajemen menjadi lebih rumit ketika aliansi tersebut terjadi di perusahaan yang terkoneksi politik sebab pihak yang terlibat menjadi lebih luas. Oleh karena itu teori agensi dipandang mampu untuk menjelaskan konflik antara manajemen dan pemegang saham terutama dalam perusahaan yang terkoneksi politik. Dalam hal ini dewan direksi berlaku sebagai pihak

manajemen. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Political connection* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

## **2. Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan**

Kepemilikan manajerial merupakan anggota direksi yang memiliki afiliasi dan kepemilikan saham perusahaan. Masulis & Mobbs (2009) menyebutkan keberadaan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan memiliki 2 (dua) peran utama, yakni meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, dan meningkatkan kesejahteraan dewan direksi serta merupakan upaya untuk mengurangi agency problem. Diharapkan ketika direksi juga ikut memiliki saham, segala keputusan yang diambil akan menguntungkan pemegang saham. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan akan berimbang pada mereka. Ketika segala keputusan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan pemegang saham, hal tersebut akan sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial juga menjadi jembatan agar kepentingan para anggota direksi terjamin. Kepentingan direksi yang diperhatikan dalam kebijakan perusahaan membuat anggota direksi tidak akan terfokus pada kepentingannya, tetapi termotivasi membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Direktur yang memiliki afiliasi akan berusaha untuk membantu perusahaan untuk dapat mencapai kinerja yang baik, karena pada akhirnya mereka akan menerima keuntungan dari hubungan afiliasi

ataupun dari saham yang dimiliki. Namun hal ini akan berbeda ketika manajer yang terafiliasi memiliki hubungan politik.

Selain itu, menurut teori agensi struktur kepemilikan merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

### **3. Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan**

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (Siregar & Utama, 2006). Investor institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau di atas 5% (Winanda, 2009). Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor atau mengawasi perusahaan (Faisal, 2005). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Dengan adanya kontrol eksternal yang kuat maka manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan. Winanda (2009) meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil analisis model regresi kepemilikan institusional terhadap ROA menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik signifikan mempengaruhi ROA.

Hal tersebut berarti kepemilikan institusional memegang peranan penting dalam penegakkan mekanisme tata kelola perusahaan dan menjadi pengendali konflik keagenan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Pratiwi (2010) menjelaskan bahwa sesuai teori agensi, kinerja perusahaan yang lebih baik dapat dicapai dengan adanya praktek *good corporate governance* yang memberikan pengawasan dan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang saham. Faisal (2005) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance*. Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan

institusional, kinerja perusahaan seharusnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

#### **4. Keberagaman Gender Dewan Komisaris terhadap Kinerja**

##### **Keuangan**

Keragaman gender sangat berkaitan dengan lingkungan kerja saat ini, dalam hal ini pria dan wanita dipekerjakan pada tingkat yang sama, dibayar dengan gaji yang sama dengan pekerjaan yang sama, dan dipromosikan pada tingkat yang sama. Keragaman gender sangat penting bagi tempat kerja manapun. Hal ini karena pria dan wanita memiliki sudut pandang, ide, dan wawasan pasar yang berbeda, yang memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih baik (Ionascu et al., 2018), (Low et al., 2015), dan (Wahid, 2018).

Cox Jr (1991), menyatakan bahwa keragaman gender memberikan beberapa keuntungan yang dapat bisa memakmurkan perusahaan. Alasan mengapa diperlukan keragaman gender dalam perusahaan, yaitu adanya perbedaan perspektif antara pria dan wanita yang dapat memberikan inovasi serta memicu kreativitas yang dapat membantu perusahaan menemukan dan menangkap peluang baru (Ionascu et al., 2018).

Menurut teori keagenan, dewan komisaris merupakan perwakilan dari prinsipal yang terbiasa mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan prinsipal dan agen. Dewan komisaris merupakan alat penting untuk mengelola agen. Dengan adanya



keragaman gender pada manajemen puncak memberikan dampak yang positif jika diterapkan, selain meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, keragaman gender ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Keberadaan gender juga bisa meminimalisir biaya agensi yang terjadi dalam perusahaan. Proporsi perempuan dalam dewan tentunya mempengaruhi nilai perusahaan. Memiliki seorang wanita di dewan sangat berpengaruh karena dia memiliki kendali lebih besar atas manajemen perusahaan dan memberi nasihat kepada direktur. Sehingga keberadaan gender dalam sistem manajemen perusahaan tentu saja menambah nilai dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tanpa wanita (Nugroho & Widiasmara, 2019)

Peran dewan komisaris maupun dewan direksi dalam menjalankan perusahaan sangat berbeda. Dalam konteks dewan komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan terutama mengawasi bagaimana dewan direksi dalam menjalankan tugasnya merupakan suatu komponen penting yang dapat membantu dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan, dengan adanya keberagaman gender dalam dewan komisaris bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan semakin membaik, dimana dengan beragamnya gender dalam dewan komisaris dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing anggota baik itu wanita maupun pria. Sehingga dalam proses pengawasan terhadap dewan direksi lebih maksimal dibandingkan tidak ada wanita sama sekali dalam struktur

dewan komisaris (Wiley & Monllor-Tormos, 2018). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Keberagaman Gender Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

